

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA**

Oleh:
HUSEN YAHYA SUIT PONTOH
S2120041

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Oleh:

HUSEN YAHYA SUIT PONTOH

S2120041

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Telah disetujui dan diseminarkan,
Gorontalo, - - 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Fatma M. Ngablio, S.I.P.,M.Si
NIDN: 0927128301

Pembimbing II

Swastiani Dunggio, S.I.P.,M.Si
NIDN: 1626059101

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan


Purwanto, S.I.P.,M.Si
NIDN. 0926096601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Oleh :

HUSEN YAHYA SUIT PONTOH

S2120041

SKRIPSI

Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal - - - 2024
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

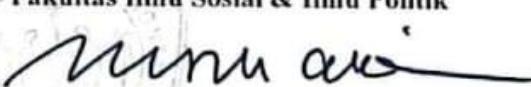
Tim Pembimbing dan Penguji :

1. Dr. Fatma M. Ngabito, S.I.P.,M.Si
2. Swastiani Dunggio, S.I.P.,M.Si
3. Dr. Sandi Prahara, ST.,M.Si
4. Darmawaty Abd. Razak, S.I.P.,M.AP
5. Marten Nusi, S.I.P.,M.AP

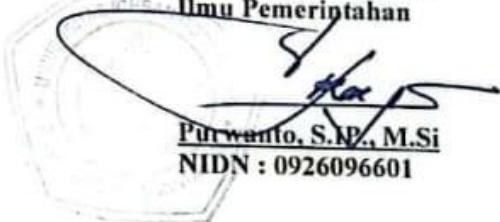
(.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)
 (.....)

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik


Dr. Mohammad. Sakir, S.Sos.,S.I.Pem., M.Si
 NIDN : 0913027101

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan


Purwanto, S.I.P., M.Si
 NIDN : 0926096601

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husen Yahya Suit Pontoh

Nim : S2120041

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Sosial dan Politik

Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dengan ini saya menyatakan dengan sesunguhnya bahwa skripsi yang di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memenuhi ujian akhir di universitas ichsan Gorontalo merupakan hasil karya saya sendiri.

Apa bila bagian-bagian tertentu dalam penulisan yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah di tuliskan sebenarnya dengan jelas sesuai norma, kaida, etika penulisan ilmiah dan buku penulisan ilmiah universitas ichsan Gorontalo.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau bagian skripsi ini bukan hasil karya sendiri atau terdapat bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

Yang Membuat Pernyataan



Husen Yahya Suit Pontoh

ABSTRACT

HUSEN YAHYA SUIT PONTOH. S2120041. THE EFFECT OF BUDGET ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY ON THE PERFORMANCE OF MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF NORTH BOLAANG MONGONDOW REGENCY

This study aims to determine and describe to what extent the effect of budget accountability and transparency (X) on the performance of the members of the Regional House of Representatives (Y) in the Office of Regional House of Representatives of North Bolaang Mongondow Regency. This study uses a quantitative approach with a survey method. The number of samples in this study consists of 25 people. The data analysis method applies simple linear regression analysis. The results show that Accountability and Transparency (X) affect the Performance of Members of the Regional House of Representatives of North Bolaang Mongondow Regency (Y) by 62.2%, while the remaining 37.8% is affected by other factors unstudied. The results of this study explain that the higher the Accountability and Transparency, the more the Performance of the Members of Regional House of Representatives of North Bolaang Mongondow Regency increases.

Keywords: accountability, transparency, performance, Members of the Regional House of Representatives



ABSTRAK

HUSEN YAHYA SUIT PONTOH. S2120041. PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran (X) terhadap kinerja anggota DPRD (Y) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 25 orang. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi (X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (Y) sebesar 62,2% sedangkan sisanya 37,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Akuntabilitas dan Transparansi maka akan semakin meningkat pula Kinerja Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, kinerja, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bolehka aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku imu yang benar dan antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu” Surat A-kahfi ayat 66

“Seorang pahawan lahir di antara ratusan. Orang bijak di temukan di antara ribuan, tetapi sesuatu yang dicapai mungkin tidak di temukan bahkan di antara seratus ribu orang. Keberhasilan menggoda banyak orang untuk kehancuran mereka”.tokoh filsuf Plato.

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas berkatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada, Kedua Orang tua, Istri tercinta, anak terkasih, segenap civitas Akademika kampus Universitas Ichsan Gorontalo, staf Pengajar, karyawan administrasi, dan Teman-teman seangkatan Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kepada Allah SWT, Berkat, Rahmat, Hidayah, dan Karunianya Kepada Penulis sehingga masih diberikan kesempatan, kekuatan, serta kemampuan dalam Menyelesaikan Skripsi yang berjudul judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara”** ini dengan baik. Solawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa suatu ajaran keselamatan kepada manusia sampai akhir jaman, dan semoga rahmat dan hidayahnya tetap sampai kepada kita sebagai umat yang masih konsisten mengikuti ajarannya.

Adapun tujuan dari penulisan Skripsi penelitian ini yaitu untuk mempelajari dan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai Penulis saya menyadari dalam penyusunan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu Dalam Kesempatan ini tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Kedua Orang Tua, Keluarga saya yang telah memberi dukungan dan Do'a selama ini. Juga tidak lupa, Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Hj Juriko Abdussamad, M.Si sebagai ketua yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo , Bapak Dr. Mochammad. Sakir, S.Sos., S.I.Pem., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Purwanto, S.I.P., M.Si

selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Dr. Fatma Ngabito,S.IP.,M.Si Selaku pembimbing I, Pembimbing II Ibu Swastiani Dunggio, S.IP.,M.Si dan Ibu Dr. Fatma M. Ngabito, S.IP.,M.Si Selaku Motivator saya, Serta Bapak Ibu Staf Dosen Pengajar di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo, Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik, program Studi Ilmu Pemerintahan. Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Gorontalo, Novemebr 2023
Penyusun

Husen Yahya Suit Pontoh

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK INGGRIS	iv
ABSTRAK INDONESIA	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	9
1.3.1 Maksud Penelitian	9
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan	11
2.2 Pendekatan New Publk Managemen Sektor Publik	14
2.3 Konsep Dan Dimensi Akuntabilitas.....	18
2.4 Dimensi Implementasi Kebijakan	22
2.5 Fungsi Anggaran Sektor Publik	24
2.6 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	27
2.7 Kerangka Pemikiran.....	28
2.8 Hipotesis	32
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	33
3.1 Objek dan Lokasi Penelitian	33
3.2 Metode Penelitian	34
3.2.1 Desain Penelitian	34
3.2.2 Operasionalisasi Variabel	34
3.2.3 Populasi dan Sampel	37
3.2.3.1 Populasi.....	37
3.2.3.2 Sampel	37
3.2.4 Jenis dan Sumber Data	38
3.2.5 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.2.6 Prosedur Penelitian.....	39

3.2.6.1 Uji Validasi	39
3.2.6.2 Uji Rehabilitas.....	41
3.2.7 Metode Analis Data.....	42
3.2.7.1 Rancangan Uji Hipotesis	42
3.2.7.2 Penguji Hipotesis.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran umum DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	45
4.1.1 Sejarah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	45
4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD	47
4.2 Gambaran Umum Responden.....	54
4.3 Hasil Penelitian	56
4.3.1 Uji Validasi Data Responden Penelitian.....	56
4.3.2 Uji Reliabilitas Data Responden	58
4.3.3 Hubungan Akuntabilitas dan Transparansi (X) dan Kinerja Anggota Dewan (Y)	60
4.3.4 Uji Hipotesis Menggunakan regresi Sederhana	62
4.3.4.1 Akuntabilitas dan Transparansi Berpengaruh secara simulasi terhadap kinerja anggota dewan.....	62
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembahasan Hasil Penelitian	6
Tabel 1.2 Rata-rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	7
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel X	35
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Y	36\
Tabel 3.3 Bobot Nilai Pilihan Jawaban Responden.....	37
Tabel 3.4 Tingkat Korelasi.....	40
Tabel 4.1 Data Demografi Responden	55
Tabel 4.2 Hasil Uji Validasi Instrumen Akuntabilitas dan Transparansi (X)	57
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitasi Instrumen Akuntabilitas dan Transparansi (X) .	58
Tabel 4.5 Hasil Uji reliabilitas Instrumen Kinerja Anggota Dewan (Y)	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	20
Gambar 2	28
Gambar 2.4 Bagan Alur Kerangka Pikir	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja yang baik melibatkan fleksibilitas anggota komisi dalam merespons perubahan kondisi dan kebutuhan daerah. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan memastikan kebijakan anggaran tetap relevan dan efektif. Pentingnya kinerja anggota komisi dalam proses penyusunan anggaran bukan hanya terletak pada pemahaman teknis tetapi juga pada kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan lainnya, mendengarkan masyarakat, dan membuat keputusan yang berdampak positif bagi pembangunan daerah. Yusfizal, A., & Zuhri, M. (2018) mengatakan bahwa kinerja yang baik melibatkan kemampuan anggota komisi untuk bernegosiasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk anggota DPRD lainnya, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat. Kolaborasi yang baik dapat menghasilkan keputusan yang lebih mendukung dan dapat diterima.

Mewujudkan pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan memerlukan kerangka kerja yang kokoh dan komitmen yang kuat dari pihak terkait. Adanya kebijakan publik yang jelas dan terukur mengenai pengelolaan anggaran, termasuk prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kebijakan ini dapat mencakup pedoman-pedoman untuk penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Nurdiansyah, E. (2016) mengatakan diera modern hampir tidak ada lagi celah untuk tidak menyediakan informasi anggaran yang

lengkap dan mudah diakses oleh publik. Ini dapat mencakup publikasi dokumen anggaran, laporan keuangan, dan informasi terkait secara terbuka, baik melalui situs web resmi, media massa, atau saluran komunikasi lainnya.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, menggunakan sistem informasi keuangan yang terintegrasi untuk memantau dan melaporkan pengelolaan anggaran. Sistem ini dapat membantu otomatisasi proses, meningkatkan akurasi data, dan memudahkan akses informasi. Ardiniasari, I. F., & Aisyah, M. N. (2017) menegaskan bahwa Meningkatkan kapasitas institusi yang terlibat dalam pengelolaan anggaran, termasuk aparat pemerintah dan lembaga audit. Pelatihan yang berkala dan pembaruan pengetahuan mengenai praktik terbaik dapat mendukung pengelolaan anggaran yang efektif. Memastikan adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Audit internal dan eksternal secara teratur dapat membantu mendeteksi dan mencegah ketidakberesan serta memastikan bahwa proses pengelolaan anggaran berjalan sesuai dengan aturan.

Fenomenologi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah seringkali dikritik berbagai pangamat ekonomi dan masyarakat yang menganggap pengelolaan anggaran tidak dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Tuasikal, A. (2015) menyebutkan kritik dapat muncul karena kurangnya transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Ketidakjelasan dalam alokasi dana dan prioritas pembangunan dapat merugikan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yang terbatas dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara rencana pembangunan dan kebutuhan sebenarnya di masyarakat. Kritik dapat timbul jika keputusan dibuat tanpa

memperhitungkan masukan langsung dari warga setempat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menyulitkan perencanaan jangka panjang dan penganggaran pemerintah daerah. Fenomena ini bisa menimbulkan kritik terhadap kebijakan yang mungkin tidak cukup responsif terhadap perubahan ekonomi. Siwu, H. F. D. (2019) menambahkan bahwa kritik muncul jika ada tanda-tanda korupsi atau penyalahgunaan keuangan dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. Fenomena ini dapat merugikan efisiensi dan keberlanjutan pembangunan.

Huda, N. M. (2019) dalam bukunya yang berjudul hukum pemerintahan daerah menegaskan bahwa kewenangan untuk merumuskan kebijakan anggaran dibagi antara cabang eksekutif dan legislatif. Pada tingkat eksekutif, kewenangan utama ada pada kepala eksekutif daerah (gubernur atau bupati/wali kota) dan timnya. Mereka bertanggung jawab untuk menyusun rancangan anggaran pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah eksekutif memiliki tanggung jawab untuk menentukan prioritas penggunaan dana dan alokasi sumber daya berdasarkan kebutuhan dan tujuan pembangunan daerah. Setelah anggaran disetujui, eksekutif bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu setelah tahapan penyusunan anggaran dan penentuan prioritas ditingkat eksekutif, peran dari unsur legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah pada pengesahan anggaran. DPRD memiliki hak untuk menilai, memodifikasi, atau menolak rancangan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Dalam beberapa sistem, DPRD juga dapat mengajukan usulan perubahan

anggaran, Huda, N. M. (2019). DPRD bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah. Mereka dapat melakukan evaluasi terhadap capaian program, penggunaan dana, dan efisiensi pelaksanaan kebijakan. DPRD juga berperan sebagai pengambil keputusan terkait kebijakan anggaran. Mereka dapat memberikan masukan dan menetapkan arah kebijakan anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prayoga, R., Lubis, Z. T., & Dalimunthe, A. A. (2022).

Dari kondisi ideal tentang pengelolaan anggaran tersebut, peneliti kemudian memfokuskan penelitian ini pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan observasi yang peneliti laksanakan, peneliti melihat kelemahan dalam proses penyusunan anggaran sering terjadi disharmonisasi koordinasi dan negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Kerja sama yang baik antara kedua lembaga ini penting untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara kebijakan dan kontrol. Padahal mereka sama-sama bertanggungjawab untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran.

Pengelolaan anggaran di Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seringkali melibatkan sejumlah permasalahan yang dapat mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa permasalahan, diantaranya:

1. Politik dan kepentingan pribadi. Adanya politik dan kepentingan pribadi di dalam DPRD dapat mengarah pada keputusan-keputusan anggaran yang lebih

didasarkan pada pertimbangan politik atau kepentingan kelompok tertentu daripada pada kepentingan umum;

2. Ketidaktransparan dan kurangnya informasi Kurangnya transparansi dalam penyusunan anggaran dan kurangnya akses terhadap informasi dapat menyulitkan anggota DPRD untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang efektif;
3. Konflik antara DPRD dan Eksekutif. Konflik antara DPRD dan pemerintah daerah eksekutif, terutama terkait prioritas anggaran dan alokasi sumber daya, dapat menghambat proses perencanaan dan penganggaran;
4. Kurangnya kapasitas dan keahlian. Beberapa anggota DPRD mungkin kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek keuangan dan anggaran. Hal ini dapat mengurangi kapasitas mereka untuk secara efektif menilai dan mengawasi rancangan anggaran;
5. Keterbatasan waktu. Waktu yang terbatas untuk membahas dan menilai rancangan anggaran dapat menghambat upaya anggota DPRD untuk melakukan pengawasan yang cermat;
6. Ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Jika anggota DPRD tidak berhasil memahami dan merefleksikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, maka hasilnya mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat;
7. Perubahan kebijakan yang sering terjadi. Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat membuat ketidakpastian dalam perencanaan jangka panjang dan penganggaran. Road map pembangunan dan pemberdayaan pemerintah daerah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berimplikasi pada seringnya pergeseran atau perubahan anggaran.

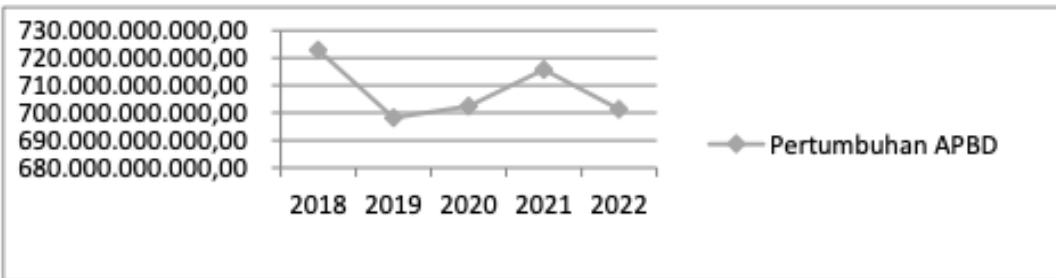
Berikut ini peneliti menampilkan data pertumbuhan APBD selang Tahun 2018-2022 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara:

Tabel 1.1 Pertumbuhan APBD selang Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran					Rata-Rata (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendapatan Daerah	709.357.564.858,22	677.294.651.578,33	664.815.356.129,11	701.853.762.844,00	676.554.910.981,00	-1,18%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16.229.687.927,22	21.107.712.880,00	27.736.023.829,11	23.151.208.178,00	23.994.514.319,00	10,27%
Pendapatan Transfer	682.146.724.458,00	645.224.399.053,00	625.517.730.462,00	667.200.607.382,00	652.560.396.662,00	-1,10%
Lain-Lain Pendapatan Dearah Yang Sah	10.981.152.473,00	10.962.539.645,00	11.561.610.838,00	11.501.967.284,00	0,00	1,56
Belanja Daerah	605.139.710.529,33	570.312.482.681,27	578.476.357.591,06	591.504.002.412,00	589.405.895.298,00	-0,66%
Belanja Operasi	417.800.365.657,33	398.069.302.564,00	393.907.333.513,95	404.246.612.141,00	406.268.693.907,00	0,70 %
Belanja Modal	185.399.536.052,00	170.863.318.117,27	175.042.546.926,97	185.757.390.271,00	181.062.917.782,00	0,59 %
Belanja tidak terduga	1.939.808.820,00	1.379.862.000,00	9.526.477.150,14	1.500.000.000,00	2.074.283.609,00	1,69
Belanja transfer	117.713.310.309,73	127.883.326.183,51	123.902.592.506,00	124.201.585.184,00	111.887.628.600,00	-1,26
Surplus/Defisit	(13.495.455.980,84)	(20.901.157.286,78)	(37.563.584.967,95)	(13.851.804.752,00)	(24.738.612.917,00)	16,36%
Pembiayaan Daerah	13.495.455.980,84	20.901.157.286,78	37.563.584.967,95	13.851.804.752,00	24.738.612.917,00	16,36%
Pembiayaan Netto	13.495.455.980,84	20.901.157.286,78	37.563.584.967,95	13.851.804.752,00	24.738.612.917,00	16,36%
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Sumber Data: BPKD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

Tabel 1.2 Rata-Rata Pertumbuhan APBD Kabupaten Bolmut 2018-2022



Berdasarkan perhitungan rasio pada tabel diatas jelas terlihat bahwa pertumbuhan total Pendapatan Daerah dan Total Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2018-2022 mengalami tren penurunan. Dari sudut pandang peneliti tren penurunan ini disebabkan oleh beberapa kondisi empiris diantaranya: 1) perekonomian lemah. Perekonomian yang kurang sehat dapat mengurangi aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan, produksi, dan konsumsi, yang pada gilirannya mempengaruhi penerimaan pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya; 2) pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. jika pemerintah pusat mengurangi alokasi dana transfer ke daerah atau melakukan pemotongan anggaran untuk program-program tertentu, hal ini dapat berdampak langsung pada Pendapatan Daerah; dan 3) ketidakpastian stabilitas politik didaerah. Ini menjadi kelemahan yang dapat dirasakan akibat sinergitas pemerintah dijajaran eksekutif yang kurang memaksimalkan kolaborasi dengan jajaran legislatif DPRD.

Kondisi ideal dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi anggaran memerlukan Peran dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Mashadi, M. (2018) mengatakan dalam perspektif pemerintahan daerah, parimeter untuk mengarahkan organisasi mencapai akuntabel dan transparan diantaranya: 1) Transparansi informasi. Tingkat keterbukaan informasi anggaran, termasuk publikasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Laporan Keuangan Daerah, dan informasi anggaran lainnya di situs web resmi pemerintah daerah; 2) Partisipasi public. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran. Indikator ini mencakup mekanisme konsultasi publik, pertemuan umum, atau forum partisipatif lainnya; 3)

Kepatuhan terhadap regulasi. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan anggaran, baik itu peraturan pusat maupun peraturan daerah; dan 4) Kualitas perencanaan anggaran. Evaluasi terhadap kualitas perencanaan anggaran, termasuk kejelasan visi dan tujuan, keterlibatan masyarakat, dan kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan pembangunan. Sementara itu Husain, F. (2021) mengatakan bahwa kinerja anggota DPRD dalam proses penganggaran dapat dilihat dari aspek: 1) Pemahaman anggaran; 2) Analisis kebijakan anggaran; dan 3) Pengawasan eksekusi anggaran.

Pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD tidak hanya menciptakan kepercayaan masyarakat, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh sebab itu peneliti ingin memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran (X) terhadap kinerja anggota DPRD (Y) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran (X) terhadap kinerja anggota DPRD (Y) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran (X) terhadap kinerja anggota DPRD (Y) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep dan kerangka kerja teoritis yang mendasari akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran di tingkat komisi legislatif. Hal ini dapat melibatkan identifikasi model-model teoritis, kerangka konseptual, dan asumsi-asumsi yang mendasari praktik-praktik akuntabilitas dan transparansi.
2. Penelitian dapat memperkuat konsep akuntabilitas dan transparansi dalam konteks pengelolaan anggaran di tingkat DPRD. Dengan mengidentifikasi elemen-elemen kunci, hubungan antar konsep, dan dampaknya, penelitian dapat membantu memperjelas bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Penelitian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi akuntabilitas dan transparansi di Komisi 1 DPRD. Ini mencakup analisis terhadap faktor politik, organisasional, dan budaya yang dapat memengaruhi efektivitas tata kelola anggaran.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian dapat membantu mengidentifikasi area-area di mana pengawasan Komisi 1 DPRD dapat ditingkatkan. Informasi ini dapat membimbing perubahan dalam pendekatan pengawasan dan membantu Komisi 1 untuk lebih efektif dalam mengawasi pengelolaan anggaran.
2. Dapat mengidentifikasi kekurangan dalam partisipasi publik, Komisi 1 dapat memperbaiki mekanisme partisipatif, seperti menyelenggarakan pertemuan terbuka atau konsultasi publik, untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan anggaran

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Ilmu Pemerintahan

Ilmu pemerintahan adalah sebuah cabang ilmu dari kajian ilmu politik. Sampai saat ini masih terdapat beberapa perdebatan mengenai ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Kajian utama kepemimpinan pemerintahan adalah kebijakan pemerintahan (publik policy). Pada intinya membuat suatu kebijakan pemerintahan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan itu sendiri karena kebijakan publik merupakan decision making (memilih dan menilai informasi yang ada untuk memecahkan masalah). Pemerintahan merupakan suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena pemerintahan sudah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan seperti dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek baik material maupun formal, bersifat universal dan sistematis serta spesifik,

Yunanto, S. E. (2020)

Berdasarkan aspek statistika, maka “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Sedangkan dalam aspek dinamika maka pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Yunanto, S. E. (2020) mengatakan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan

hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Yunanto, S. E. (2020) pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama. Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan. Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban didalam masyarakat sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Dan pemerintah modern pada hakekatnya adalah pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama, Sedangkan sudut pandang organisasi sebagai makhluk hidup memiliki cara pandang bahwa tidak adasatu jenis organisasi yang dapat menjawab berbagai masalah dan cocok untuk semua kondisi sehingga organisasi dapat terus beradaptasi terhadap lingkungannya yang dinamis.

Pendapat lain juga dikatakan oleh Haboddin, M. (2015) bahwa birokrasi disusun sebagai hierarki otoritas yang terelaborasi, yang mengutamakan pembagian kerja secara terperinci, yang dilakukan sistem administrasi, khususnya oleh aparatur pemerintah. Ciri utama dari struktur birokrasi adalah adanya prinsip pembagian kerja, struktur hierarkis, aturan dan prosedur, prinsip netral dan tidak memihak, penempatan berdasarkan karier dan birokrasi murni. Dengan adanya paradigmabaru, birokrasi memiliki ciri-ciri tambahan, yaitu mengarahkan, memberdayakan, dan menciptakan persaingan dalam pelayanan publik.

Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, M. (2021) dalam jurnal hasil penelitiannya menemukan bahwa terdapat empat fungsi yang diemban sebuah birokrasi negara, yaitu:

1. Fungsi instrumental, yaitu menjabarkan kebijakan perundang-undangan dan kebijaksanaan publik dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu.
2. Fungsi politik, yaitu memberi input berupa saran, informasi, fisik, dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan.
3. Fungsi katalis publik interest, yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik dan mengintegrasikan ke dalam kebijaksanaan dan keputusan pemerintah.
4. Fungsi entrepreneurial, yaitu memberikan inspirasi bagi kegiatankegiatan inovatif, mengaktifkan sumber-sumber potensial yangideal dan menciptakan resource-mix yang optimal untuk mencapai tujuan.

Tugas pemerintah menurut Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, M. (2021) adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Karena Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: Pelayanan (service), Pemberdayaan (empowerment), dan Pembangunan (development).

Yunanto, S. E. (2020) mengemukakan ada empat fungsi pokok pemerintah, yaitu: Pertama, memelihara ketertiban dan ketenangan (*maintenance of peace and order*), Kedua, pertahanan dan keamanan, Ketiga, diplomatik dan Keempat, perpajakan. Terdapat dua macam fungsi pemerintah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

2.2 Pendekatan *New Public Management* Sektor Publik

New Public Management (NPM) adalah suatu pendekatan dalam manajemen sektor publik yang muncul pada akhir abad ke-20. Pendekatan ini menekankan prinsip-prinsip manajemen swasta untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas di sektor publik. Para ahli memiliki pandangan yang beragam terkait dengan NPM. Adanya berbagai nama untuk menyebut pendekatan

manajemen modern di sektor publik tersebut pada dasarnya bermuara pada pandangan umum yang sama.

Indahsari, C. L., & Raharja, S. U. J. (2020) mengatakan bahwa pendekatan NPM diantaranya: *Pertama*, perubahan model manajemen publik tersebut menunjukkan adanya pergeseran besar dari model administrasi publik tradisional menuju sistem manajemen publik modern yang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pencapaian kinerja dan akuntabilitas manajer publik. *Kedua*, perubahan itu menunjukkan adanya keinginan untuk bergerak meninggalkan model birokrasi klasik menuju model organisasi modern yang lebih fleksibel. *Ketiga*, perlunya dibuat tujuan organisasi yang jelas dan tujuan personal. Hal itu berdampak pada perlunya dilakukan pengukuran atas prestasi yang mereka capai melalui indikator kinerja. Terdapat evaluasi program secara sistematisik. *Keempat*, staf senior tampaknya secara politis lebih *commit* terhadap pemerintahan saat itu daripada bersikap netral atau non-partisan. *Kelima*, fungsi pemerintah tampaknya akan lebih banyak berhadapan dengan pasar, misalnya tender, yang oleh Osborne dan Gaebler (1992) disebut “*catalytic government: steering rather than rowing*.” Keterlibatan pemerintah tidak selalu berarti pemfasilitasan pemerintah melalui sarana birokrasi. *Keenam*, terdapat kecenderungan untuk mengurangi fungsi pemerintah melalui privatisasi dan bentuk lain dari marketisasi sektor public.

NPM merupakan teori manajemen publik yang beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kinerja sektor publik perlu diadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan di

sektor swasta ke dalam organisasi sektor publik, seperti pengadopsian mekanisme pasar, kompetisi tender (*Compulsory Competitive Tendering*- CCT), dan privatisasi perusahaan-perusahaan public

Penerapan konsep *New Public Management* telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Penerapan konsep NPM dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik, depolitisasi kekuasaan, atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat Puspawati, A. A. (2016). Beberapa pihak meyakini bahwa paradigma *New Public Management* merupakan sebuah fenomena internasional sebagai bagian dari proses global. Konsep NPM begitu cepat mempengaruhi praktik manajemen publik di berbagai negara sehingga membentuk sebuah gerakan yang mendunia.

Indrawati, L. (2017) Terdapat beberapa masalah dalam menerapkan konsep *New Public Management* di negara berkembang:

Pertama, *New Public Management* didasarkan pada penerapan prinsip/mekanisme pasar atas kebijakan publik dan manajemennya. Hal ini juga terkait dengan pengurangan peran pemerintah yang digantikan dengan pengembangan pasar, yaitu dari pendekatan pemerintah sentris (*state centered*) menjadi pasar sentris (*market centered approach*). Negara-negara berkembang memiliki pengalaman yang sedikit dalam ekonomi pasar. Pasar di negara

berkembang relatif tidak kuat dan tidak efektif. Perekonomian pasarnya lebih banyak didominasi oleh asing atau perusahaan asing, bukan pengusaha pribumi atau lokal. Di samping itu, pasar di negara berkembang tidak efektif karena tidak ada kepastian hukum yang kuat. Sebagai contoh, masalah kepatuhan terhadap kontrak kerja sama (*contract right*) sering menjadi masalah.

Kedua, terdapat permasalahan dalam privatisasi perusahaan-perusahaan publik. Privatisasi di negara berkembang bukan merupakan tugas yang mudah. Karena pasar di negara berkembang belum kuat, maka privatisasi akhirnya akan berarti kepemilikan asing atau kelompok etnis tertentu yang hal ini dapat membahayakan, misalnya menciptakan keretakan sosial.

Ketiga, Perubahan dari mekanisme birokrasi ke mekanisme pasar apabila tidak dilakukan secara hati-hati bisa menciptakan wabah korupsi. Hal ini juga terkait dengan permasalahan budaya korupsi yang kebanyakan dialami negara-negara berkembang. Pergeseran dari budaya birokrasi yang bersifat patronistik menjadi budaya pasar yang penuh persaingan membutuhkan upaya yang kuat untuk mengurangi kekuasaan birokrasi.

Keempat, terdapat masalah untuk berpindah menuju pada model pengontrakkan dalam pemberian pelayanan publik jika aturan hukum dan penegakannya tidak kuat. Model pengontrakkan akan berjalan baik jika outcomenya mudah ditentukan. Jika tujuan organisasi tidak jelas, atau terjadi wabah korupsi yang sudah membudaya maka penggunaan model-model kontrak kurang berhasil.

Terdapat permasalahan politisasi

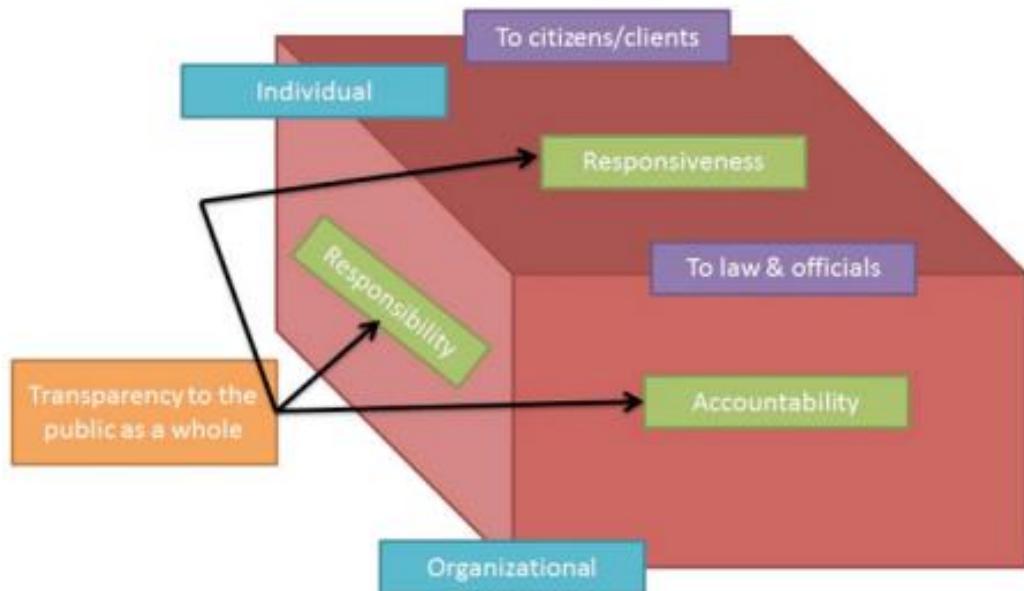
2.3 Konsep Dan Dimensi Akuntabilitas

Konsep akuntabilitas mulai dikaji secara intensif pada sektor publik seiring dengan berkembangnya konsep mengenai reinventing government (Osborne dan Gaebler (1992) sebagaimana yang dikutip Svara, J. H. (2017). Dalam buku mereka yang berjudul Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming The Public Sector, konsep akuntabilitas disebut sebanyak sembilan kali. Hal ini menunjukkan bahwa Osborne dan Gaebler semenjak awal hendak memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktik bagi aktor-aktor wirausaha sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas. Penulis yang berbeda, yaitu Osborne (2010: 42) dan Christensen, et.al. (2007: 108) menjelaskan bahwa sejalan dengan penekanan akuntabilitas pada reinventing government, ternyata konsep akuntabilitas juga masuk sebagai fokus utama dalam Manajemen Publik Baru atau yang sering kali disebut dengan istilah New Public Management (NPM). Oleh karenanya, akuntabilitas dapat dikatakan sebagai faktor pembeda utama antara kajian Administrasi Publik Klasik (old Public Administration) dengan New Public Management. Hal ini bermakna bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik moderen sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik. Akademisi lainnya yakni Peters (2010: 165) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang berbeda dari tanggung jawab (responsibilitas). Wicaksono, K. W. (2015).

Akuntabilitas lebih merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak di luar organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada tingkat makroorganisasi yang menekankan pada aspek sosiologi organisasi dengan

fokus interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan tanggung jawab lebih menekankan pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam suatu organisasi publik untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar etika yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar sesuai dengan arahan dan pelatihan yang telah diterimanya.

Wicaksono, K. W. (2015) yang menjelaskan bahwa sebagai bagian dari organisasi sektor publik, maka anggota organisasi harus patuh terhadap hukum yang secara umum mengatur bagaimana sebuah kebijakan diadministrasikan dan khususnya hukum yang secara spesifik mengatur program tertentu yang tengah mereka laksanakan. Penjelasan ini semakin terang manakala kita mencoba untuk memetakan tiga konsep sekaligus yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan responsivitas sebagai bagian dari transparansi kepada publik secara keseluruhan sebagaimana yang disampaikan oleh Gortner, Nichols, dan Ball (2007: 195). Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu elemen dari tiga elemen yang ada. Akuntabilitas merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan penjelasan atas tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap organisasi tersebut. Wicaksono, K. W. (2015).



Gambar 1

Akuntabilitas menuju Transparansi Sumber: diadaptasi dari Gortner, Nichols dan Ball, Dalam Wicaksono, K. W. (2015).

Terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik. Pemikir berikutnya adalah Henry (2007: 109) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan refleksi dari pemerintah yang memiliki misi yang jelas dan menarik serta berfokus pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah hendaknya meningkatkan akuntabilitasnya terhadap kepentingan publik dalam konteks hukum, komunitas, dan nilai bersama. Berdasarkan sejumlah definisi akuntabilitas tersebut, maka definisi akuntabilitas yang akan digunakan dalam tulisan ini adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan

penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Koppel dalam Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013: 17-18) menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas.

Pertama, transparansi yang merujuk pada kemudahan akses untuk mendapat informasi terkait dengan fungsi dan kinerja dari organisasi. Kedua, pertanggungjawaban yang merujuk pada praktik untuk memastikan individu dan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan dan aktivitasnya, memberikan hukuman pada tindakan yang salah dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Ketiga adalah pengendalian, yang merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya. Keempat adalah tanggung jawab, yang merujuk pada organisasi hendaknya dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Kelima, adalah responsivitas yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan. Kelima dimensi inilah yang membantu mengukur sejauh mana sebuah organisasi pada sektor publik mampu menjalankan akuntabilitasnya. Secara lebih sederhana, Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013: 17) menentukan beberapa pertanyaan kunci determinan dari masingmasing dimensi tersebut. Berikut ini adalah tabel yang menyajikan pertanyaan-pertanyaan kunci determinan tersebut.

2.4 Dimensi Implementasi Kebijakan

Ada beberapa spekulasi dari beberapa ahli sehubungan dengan eksekusi strategi, khususnya: 1) Dalam buku Silitonga, D. (2022), teori George C. Edward Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: a) Komunikasi: Agar implementasi kebijakan berhasil, pelaksana harus menyadari apa yang harus dilakukan dan bagaimana mengkomunikasikan tujuan dan sasaran kebijakan kepada khalayak sasaran untuk mengurangi distorsi implementasi.b) Sumber Daya Terlepas dari kenyataan bahwa isi kebijakan telah dikomunikasikan secara konsisten dan jelas, implementasi akan gagal jika implementor kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakannya. Sumber daya manusia, seperti keahlian pelaksana, dan sumber daya keuangan adalah contoh dari sumber daya tersebut. c) Disposisi adalah karakter implementor dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Pelaksana dapat secara efektif melaksanakan kebijakan dengan cara yang diinginkan oleh kebijakan jika mereka memiliki sikap positif. Proses implementasi kebijakan juga tidak akan efektif jika implementor memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan pembuat kebijakan. d) Struktur Birokrasi: Implementasi kebijakan dipengaruhi secara signifikan oleh struktur organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan. Fragmentasi dan Standard Operating Procedure (SOP) adalah dua aspek dari struktur organisasi. Tidak fleksibelnya kegiatan organisasi disebabkan oleh struktur organisasi yang panjang, yang cenderung melemahkan pengawasan dan menghasilkan birokrasi berupa prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

Dalam Wahab, S. A. 2021, Edwards mengatakan bahwa sumber daya penting mencakup staf yang cukup dengan keterampilan yang baik untuk melakukan pekerjaan mereka, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan untuk menulis proposal dan mewujudkannya. pekerjaan umum. Prosedur Operasi Standar (SOP) dan fragmentasi, Edwards mengatakan dalam Wahab, S. A. 2021, ada dua karakteristik utama struktur birokrasi: SOP, atau prosedur kerja dengan langkah-langkah dasar, dibuat secara internal oleh pelaksana dalam menanggapi keterbatasan sumber daya dan waktu, serta keinginan untuk keseragaman dalam pekerjaan. organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Di sisi lain, fragmentasi disebabkan oleh tekanan di luar unit birokrasi, seperti komite legislatif, kelompok kepentingan pejabat eksekutif, konstitusi negara, dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi.

Menurut teori Merilee S. Grindle (dalam Wahab, S. A. 2021), lingkungan implementasi (context of implementation) dan isi kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi. Beberapa variabel tersebut adalah: apakah lokasi program sudah sesuai, apakah suatu kebijakan telah menyebutkan pelaksana secara rinci, dan apakah suatu program didukung oleh sumber daya yang memadai, serta sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau kelompok sasaran dicantumkan dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, dan sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan. Sebaliknya, Wibawa berpendapat (dalam Nur, A. C., & Guntur, M. 2019,) bahwa model Grindle dipengaruhi oleh konten kebijakan dan konteks

implementasi. Konsep dasarnya adalah implementasi kebijakan dilakukan setelah diubah.

2.5 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Struktur APBD terdiri atas: Anggaran pendapatan, terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
2. Bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus
3. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Anggaran belanja, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Terdapat beberapa fungsi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 1) Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan; 2) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen

dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; 3) Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan; 4) Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah; 5) Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah; 6) Fungsi distribusi memiliki makna dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 7) Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan konsep penganggaran publik konsepsi Denhardt & Denhardt (dalam Puspitosari, 2010 : 60) dimana sebuah penganggaran lebih diarahkan pada beberapa prinsip penting new public service.

Prinsip-prinsip tersebut antara lain: Pertama, serve citizens and customers. Prinsip ini menganggap apa yang menjadi kepentingan publik merupakan hasil dialog, bukan sekedar agregasi kepentingan individual. Pejabat publik tidak hanya merespon kebutuhan publik sebagai pelanggan, melainkan fokus untuk membangun relasi kepercayaan dan kolaborasi dengan warga, termasuk penjaringan persepsi para pemakai layanan. Masyarakat adalah warga negara sekaligus pelanggan yang harus dipersikian baik pada proses pemerintahan dan bernegara. Masyarakat adalah pemilik sah dari negara itu sendiri. Kedua, seek public interest, administrator publik harus memberikan kontribusi dalam

mengembangkan gagasan tentang kepentingan publik. Tujuannya bukan sekedar menemukan solusi cepat berdasarkan pilihan individual, tetapi lebih pada penciptaan kepentingan sekaligus tanggungjawab bersama yang mengutamakan kepentingan publik bukan privat. Ketiga, citizenship over entrepreneurship, prinsip ini mengutamakan lebih menghargai kewirausahaan. Kepentingan publik lebih baik apabila ditunjukkan dengan komitmen pejabat publik dalam membuat kontribusi bermakna ketimbang kepiawaian pejabat dalam mengembangkan diri sendiri. Keempat, think strategically, act democratically. Kebijakan publik dan program merupakan upaya pemenuhan kebutuhan publik dan dicapai efektif melalui usaha kolaboratif. Kelima, recognize that accountability not simple, dalam perspektif perundang-undangan, nilai-nilai kemasyarakatan, norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Keenam, serve rather than steer, pejabat publik membantu masyarakat mengartikulasikan apa yang menjadi kepentingan bersama daripada mengendalikan atau mengarahkan publik. Ketujuh, value people, not just productivity, organisasi publik akan berhasil secara jangka panjang bila bekerja secara kolaboratif dan berdasarkan kepemimpinan kolektif dengan menghargai semua masyarakat. Salah satu implementasi New Public Service adalah layanan e-Government.

Layanan yang diberikan pihak penyedia /pemerintah daerah dalam bentuk e-Government ini menjadi lebih aspiratif dengan kebutuhan masyarakat yang tak terikat ruang (bisa diakses melalui kantor, kampus, warnet, fasilitas pemerintah, media (melalui penggunaan PC, PDA, Mobile Phone) maupun waktu (akses 24 jam). Dalam aplikasi inilah pihak pemerintah daerah mengelola website daerahnya

masing-masing, secara sektoral dinas tertentu, maupun pengelolaan terintegrasi dibawah pengawasan Dinas Perhubungan, Informasi & Komunikasi atau Kantor Pengolahan Data Elektronik & Komunikasi (KPDE & KOM), dengan ragam inovasi yang salah satunya terkait isi (konten) dalam e-Government

2.6 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu dokumen perencanaan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur sumber daya keuangan yang dimilikinya. APBD mencakup rencana pendapatan dan belanja yang akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam satu periode tertentu.

Beberapa konsep utama dalam APBD menurut Amin, F. (2019) diantaranya:

1. Pendapatan Asli Dearah. Merupakan pendapatan yang berasal dari sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan lain sebagainya
2. Dana Perimbangan. Merupakan dana yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat. Dana ini melibatkan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus, yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. Belanja langsung. Termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja ini bersifat langsung mendukung penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah
4. Belanja tidak langsung. Meliputi belanja tidak langsung yang terdiri dari transfer ke daerah dan desa serta bagi hasil pajak

5. Struktur APBD. Menjelaskan sumber-sumber pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu. Ini mencakup PAD dan dana perimbangan

6. Rencana pembangunan daerah. Dalam APBD, biasanya terdapat rencana pembangunan daerah yang memuat program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini mencakup proyek-proyek infrastruktur, program sosial, dan kegiatan lain yang mendukung pembangunan daerah.



Gambar 2 Komponen APBD Dalam Buku Amin, F. (2019)

2.7 Kerangka Pemikiran

Peneliti memfokuskan penelitian ini pada transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan observasi yang

peneliti laksanakan, peneliti melihat kelemahan dalam proses penyusunan anggaran sering terjadi disharmonisasi koordinasi dan negosiasi antara eksekutif dan legislatif. Kerja sama yang baik antara kedua lembaga ini penting untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara kebijakan dan kontrol. Padahal mereka sama-sama bertanggungjawab untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran.

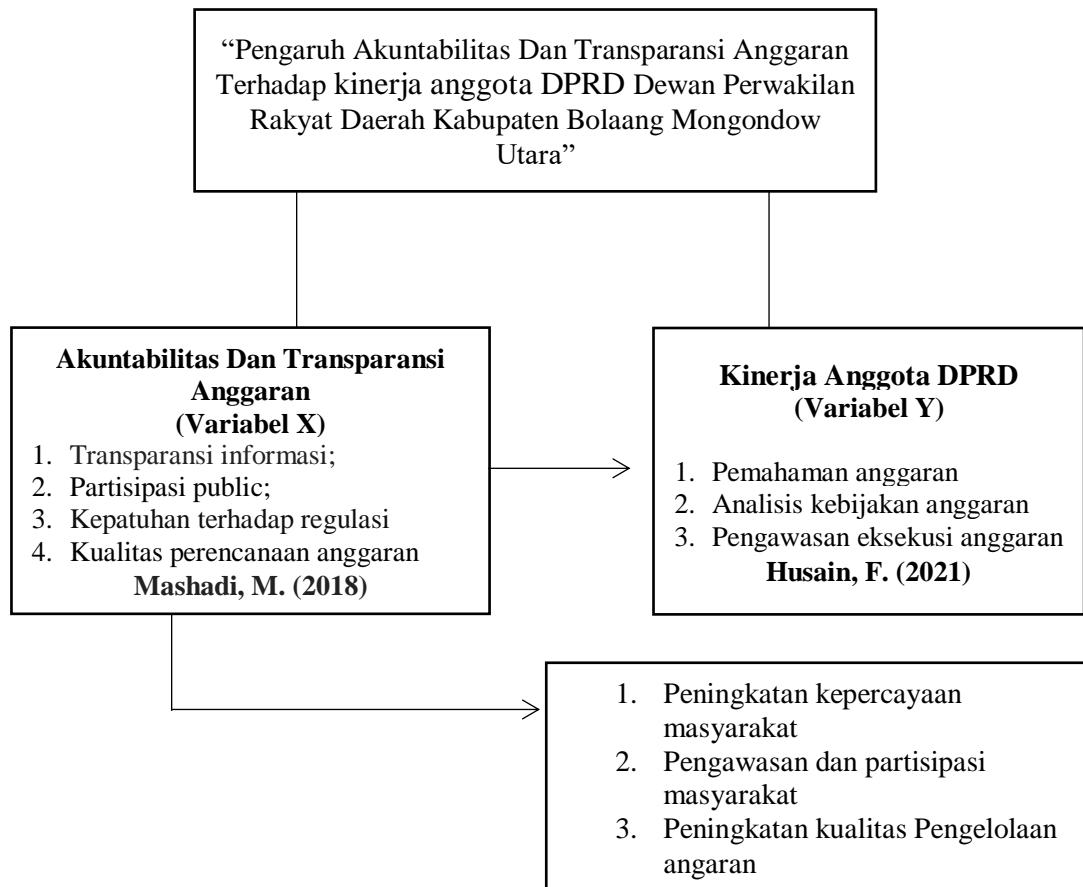
Pengelolaan anggaran di Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seringkali melibatkan sejumlah permasalahan yang dapat mempengaruhi efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan dan pengawasan anggaran. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh beberapa permasalahan, diantaranya: 1) Politik dan kepentingan pribadi. Adanya politik dan kepentingan pribadi di dalam DPRD dapat mengarah pada keputusan-keputusan anggaran yang lebih didasarkan pada pertimbangan politik atau kepentingan kelompok tertentu daripada pada kepentingan umum; 2) Ketidaktransparan dan kurangnya informasi Kurangnya transparansi dalam penyusunan anggaran dan kurangnya akses terhadap informasi dapat menyulitkan anggota DPRD untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang efektif; 3) Konflik antara DPRD dan Eksekutif. Konflik antara DPRD dan pemerintah daerah eksekutif, terutama terkait prioritas anggaran dan alokasi sumber daya, dapat menghambat proses perencanaan dan penganggaran; 4) Kurangnya kapasitas dan keahlian. Beberapa anggota DPRD mungkin kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang aspek keuangan dan anggaran. Hal ini dapat mengurangi kapasitas mereka untuk secara efektif menilai dan mengawasi rancangan anggaran; 5) Keterbatasan waktu. Waktu yang terbatas untuk membahas dan menilai rancangan

anggaran dapat menghambat upaya anggota DPRD untuk melakukan pengawasan yang cermat; 6) Ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Jika anggota DPRD tidak berhasil memahami dan merefleksikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, maka hasilnya mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat; 7) Perubahan kebijakan yang sering terjadi. Perubahan kebijakan yang sering terjadi dapat membuat ketidakpastian dalam perencanaan jangka panjang dan penganggaran. Road map pembangunan dan pemberdayaan pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berimplikasi pada seringnya pergeseran atau perubahan anggaran.

Mashadi, M. (2018) mengatakan dalam perspektif pemerintahan daerah, parameter untuk mengarahkan organisasi mencapai akuntabel dan transparan diantaranya: 1) Transparansi informasi. Tingkat keterbukaan informasi anggaran, termasuk publikasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Laporan Keuangan Daerah, dan informasi anggaran lainnya di situs web resmi pemerintah daerah; 2) Partisipasi public. Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran. Indikator ini mencakup mekanisme konsultasi publik, pertemuan umum, atau forum partisipatif lainnya; 3) Kepatuhan terhadap regulasi. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan anggaran, baik itu peraturan pusat maupun peraturan daerah; dan 4) Kualitas perencanaan anggaran. Evaluasi terhadap kualitas perencanaan anggaran, termasuk kejelasan visi dan tujuan, keterlibatan masyarakat, dan kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan pembangunan.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan pada skema kerangka pemikiran berikut ini :

Gambar 2.4 Bagan Alur Kerangka Pikir



2.8. Hipotesis

Menurut Arikunto (2006:71) hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Adapun hipotesis dalam penelitian ini ialah :

Ha : Akuntabilitas dan transparansi anggaran (X) berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD (Y) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

H0 : kinerja anggota DPRD (Y) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas dan transparansi anggaran (X) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi obyek penelitian ini adalah Pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran (X) terhadap kinerja anggota DPRD (Y) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun pemilihan objek penelitian tersebut disebabkan oleh tanggungjawab terhadap tahapan perencanaan, penganggaran, dan keuangan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Objek penelitian yang relevan dengan tugas dan tanggungjawab Komisi 1 dapat mencakup berbagai aspek terkait kebijakan publik, pengelolaan keuangan daerah dan pembangunan daerah. Namun objek kajian tidak hanya tertuju pada Komisi 1 Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, melainkan juga pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Dari penentuan objek kajian tersebut, peneliti ingin meneliti tentang proses akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang meliputi analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran daerah, serta program pembangunan daerah dan dampaknya terhadap masyarakat. Objek penelitian ini juga disesuaikan dengan kondisi dan prioritas khusus Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap distribusi APBD

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian deskriptif (menggambarkan) dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan kata – kata atau kalimat dan gambar serta angka-angka dengan memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Menurut Sugiyono (2008:6) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membantu perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel merupakan penjabaran dari suatu variabel dalam indikator atau gejala-gejala yang terperinci, sehingga variabel-variabel itu dapat diketahui ukurannya. Untuk mengetahui data-data yang diperlukan dalam penelitian maka terlebih dahulu perlu mengoperasikan variabel yang berkorelasi sesuai dengan tinjauan pustaka dan kerangka berpikir yang telah dikemukakan.

Kondisi ideal dalam menciptakan akuntabilitas dan transparansi anggaran memerlukan anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Mashadi, M. (2018) mengatakan dalam perspektif pemerintahan daerah, parimeter untuk mengarahkan organisasi mencapai akuntabel dan transparan diantaranya: 1) Transparansi informasi. Tingkat keterbukaan informasi anggaran, termasuk publikasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Laporan Keuangan Daerah, dan informasi anggaran lainnya di situs web resmi pemerintah daerah; 2) Partisipasi public. Tingkat partisipasi masyarakat dalam

proses perencanaan dan pengambilan keputusan anggaran. Indikator ini mencakup mekanisme konsultasi publik, pertemuan umum, atau forum partisipatif lainnya; 3) Kepatuhan terhadap regulasi. Tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan dan ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan anggaran, baik itu peraturan pusat maupun peraturan daerah; dan 4) Kualitas perencanaan anggaran. Evaluasi terhadap kualitas perencanaan anggaran, termasuk kejelasan visi dan tujuan, keterlibatan masyarakat, dan kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan pembangunan. Sementara itu Husain, F. (2021) mengatakan bahwa kinerja anggota DPRD dalam proses penganggaran dapat dilihat dari aspek: 1) Pemahaman anggaran; 2) Analisis kebijakan anggaran; dan 3) Pengawasan eksekusi anggaran.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel X

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Akuntabilitas dan transparansi (Variabel X)	<p>1. Transparasi informasi 2. Partisipasi public 3. Kepatuhan terhadap regulasi 4. Kualitas perencanaan anggaran</p> <p>Mashadi, M. (2018)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi terkait anggaran, kebijakan, dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah. • Kontribusi dan masukan dari masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Ini dapat melibatkan konsultasi, pertemuan umum, atau mekanisme partisipasi lainnya • Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang mengatur proses penyusunan anggaran, termasuk peraturan daerah dan peraturan nasional yang relevan. • Kesinambungan, relevansi, dan ketepatan dalam penyusunan rencana keuangan dan alokasi dana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. 	Ordinal Ordinal

Sumber : menurut Mashadi, M. (2018)

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel Y

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Skala
Kinerja Anggota DPRD (Variabel Y)	1. Pemahaman anggaran 2. Analisis kebijakan anggaran 3. Pengawasan eksekusi anggaran Husain, F. (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • Kepahaman terhadap prinsip-prinsip dasar anggaran daerah. • Kemampuan anggota komisi dalam menganalisis dan mengevaluasi kebijakan anggaran yang diajukan. • Respons terhadap ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi program/kegiatan. 	Ordinal

Sumber : menurut Husain, F. (2021)

Untuk pengukuran hasil penelitian maka peneliti memakai metode strata berurutan dengan cara kuesioner disusun dengan menggunakan skala likert, dengan menyiapkan 5 (lima) pilihan yaitu selalu, sering, kadang – kadang, jarang dan tidak pernah. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Bobot nilai pilihan jawaban responden:

Pilihan	Bobot
Selalu	5
Sering	4
Kadang – kadang	3
Jarang	2
Tidak pernah	1

3.2.3 Populasi dan Sampel

3.2.3.1 Populasi

Populasi menurut Riduwan (2008:55) merupakan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian adalah sampel adalah seluruh anggota DPRD Bolaang Mongondow Utara berjumlah 25 orang diantaranya: 1) Pimpinan DPRD; 2) Para Ketua-ketua komisi; 3) Anggota DPRD; 4) Mitra Kerja Komisi 1 di tingkat OPD

3.2.3.2 Sampel

Menurut Riduwan (2008:56) sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Untuk memperoleh sampel yang mencerminkan karakteristik populasinya secara tepat dalam hal ini tergantung oleh dua faktor metode penarikan sampel dan penentuan banyaknya ukuran sampel.

Teknik yang digunakan dalam menetapkan sampel adalah sampling jenuh, yaitu pengambilan sampel sebesar populasi yang ada. Hal ini mengacu pada pendapat Riduwan (2008:64) sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Mitra kerja ditingkat Pemerintah Daerah sebanyak 25 orang

3.2.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen dan liberator-liberatur yang berkaitan dengan tugas dan wewenang pemerintah kecamatan.
2. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden berupa data yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dengan kinerja DPRD, dengan jalan membagikan kuesioner untuk dijawab responden.

3.2.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang meliputi data primer dan sekunder dilakukan dengan cara :

1. Kuesioner dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan yang dilengkapi dengan alternatif jawaban dan dibagikan kepada sejumlah responden yaitu pegawai Pada DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
2. Observasi dilakukan dengan melihat langsung kondisi obyek di lapangan.

3.2.6 Prosedur Penelitian

Tingkat validitas (keabsahan) dan reliabilitas (kehandalan) suatu hasil penelitian sangat tergantung pada alat pengukuran yang digunakan dan dari hasil yang diperoleh.

3.2.6.1 Uji Validitas

Berkaitan dengan pengujian validitas instrumen menurut Riduwan (2008:109-110) yang menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih

dahulu dicari harga korelasi antara bagian – bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Untuk menghitung validitas alat ukur, maka digunakan rumus *Pearson Product Moment* yakni :

$$r_{hitung} = \frac{n \cdot \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{(n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2)((n \sum Y_i^2) - (\sum Y_i)^2)}}$$

Dimana :

r_{hitung} = Koefisien korelasi

$\sum X_i$ = Jumlah skor item

$\sum Y_i$ = Jumlah skor total (seluruh item)

n = Jumlah responden

selanjutnya dihitung dengan uji $-t$ dengan rumus :

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

t = Nilai t - hitung

r = Koefisien korelasi hasil r hitung

n = Jumlah responden

Distribusi (table t) untuk $\alpha = 0,05$ dan derajat kebebasan ($dk = n-2$). Kaidah keputusan :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ berarti valid, sebaliknya

$t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti tidak valid

Tabel 3.4 Tingkat Korelasi

koefisien korelasi nilai r

R	Tingkat Korelasi
0,000 – 0,199	Sangat rendah
0,200 – 0,399	Rendah
0,400 – 0,599	Sedang
0,600 – 0,799	Kuat
0,800 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiono (2008 : 184)

3.2.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan, atau konsisten alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan terhadap pertanyaan ataupun pertanyaan yang sudah valid, untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

Uji ini dilakukan dengan menggunakan teknik bela dua dari *Spearman Brown*, yang langkah – langkah kerjanya sebagai berikut :

1. Membagi pernyataan – pernyataan menjadi dua belahan.
2. Skor untuk masing – masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing – masing responden.
3. Mengkorelasikan skor belahan pertama dengan skor belahan kedua dengan menggunakan teknik korelasi *product moment*.

4. Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang dibelah (split-half), maka angka korelasi yang lebih rendah dari pada angka yang diperoleh jika alat ukur itu tidak dibelah, seperti pada teknik *test-retest*.

$$2 r_b$$

$$r_i = \frac{2 r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan:

r_i = Reliabilitasi internal seluruh instrument atau pernyataan

r_b = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Reliabel dari setiap pernyataan akan ditunjukkan dengan hasil r_i positif dan r hitung $> r$ tabel, berarti seluruh item pernyataan adalah reliable/handal.

3.2.7 Metode Analisis Data

3.2.7.1 Rancangan Uji Hipotesis

Untuk memastikan apakah terdapat pengaruh akuntabilitas dan transparansi anggaran (X) terhadap kinerja anggota DPRD (Y) di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka pengujian dilakukan dengan menggunakan metode regresi sederhana. Metode regresi sederhana dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 3.1

Struktur Metode Regresi Sederhana



Keterangan :

X = Akuntabilitas dan transparansi

Y = Kinerja anggota DPRD

3.2.7.2 Pengujian Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan, maka penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, dimana data yang telah dikumpulkan dari responden, khususnya dari kuesioner dideskripsikan dan dituangkan kedalam tabel frekuensi dan persentase.

Selanjutnya untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan uji statistik dengan menggunakan analisis regresi sederhana (Riduwan, 2008:145) dengan formulasi sebagai berikut :

Persamaan regresi adalah :

$$\hat{Y} = a + b X$$

$$a = \frac{\Sigma Y - b \cdot \Sigma X}{n}$$

$$b = \frac{n \cdot \Sigma XY - \Sigma X \cdot \Sigma Y}{n \cdot \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2}$$

Keterangan :

X = Akuntabilitas dan transparansi

Y = Kinerja anggota komisi Satu

a = Nilai konstanta harga Y jika X = 0

b = Nilai sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y.

Sedangkan untuk mengetahui derajat/besarnya hubungan antara ak(variable X) dengan Kinerja anggota komisi Satu (variabel Y), digunakan Korelasi Person Product Moment dalam Riduwan (2008:136) dengan taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$) sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n(\Sigma XY) - (\Sigma X) . (\Sigma Y)}{\sqrt{((n \Sigma X^2) - (\Sigma X)^2) ((n \Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2)}}$$

Keterangan :

X = Akuntabilitas dan transparansi

Y = Kinerja anggota DPRD

r_{xy} = Koefisien korelasi

n = Jumlah responden

korelasi PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga $(-1 \leq r \leq +1)$. Apabila nilai $r = -1$ artinya korelasinya negatif sempurna; $r = 0$ artinya tidak ada korelasi; dan $r = 1$ berarti korelasinya kuat. Sedangkan arti harga r akan dikonsultasikan dengan tabel interpretasi nilai r

selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap variabel Y dapat ditentukan dengan rumus koefisien diterminan sebagai berikut :

$$KP = r^2 \times 100\%$$

Keterangan : KP = Nilai Koefisien Determinan

r = Nilai Koefisien Korelasi

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow

4.1.1 Sejarah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 10 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara merupakan langkah awal pengisian keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang asal Daerah pemilihannya pada pemilihan umum Tahun 2004 terbagi kedalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai akibat dari undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow.

Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan

setelah pelantikan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (DPRD Bolmong Utara) adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sulawesi Utara. DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki 20 anggota yang terbagi dalam 10 Partai Politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sesi baru di mulai tanggal 16 September 2019

Ketua DPRD	:	Frangky Chendra (PDI-P) sejak 16 Oktober 2019
Wakil Ketua I	:	Salim Bin Abdullah (PPP) sejak 16 Oktober 2019
Wakil Ketua II	:	Saiful Ambarak (Golkar) sejak 16 Oktober 2019
Anggota	:	20 Orang

Partai & Kursi

PKB	:	2 Orang
Gerindra	:	1 Orang
PDI-P	:	4 Orang
Golkar	:	3 Orang
Nasdem	:	1 Orang
PKS	:	1 Orang
Perindo	:	1 Orang
PPP	:	4 Orang
PAN	:	2 Orang
Hanura	:	1 Orang

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
- 2) Menyelenggarakan administrasi keuangan
- 3) Mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 4) Menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensikronisasikan seluruh penyelenggarah tugas-tugas Sekretariat DPRD;
- 2) Perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan DPRD;
- 3) Pelaksanaan urusan tata usaha, mengelolah dan membina kepegawaian, mengelolah perlengkapan / perbekalan rumah tangga;
- 4) Fasilitas dalam penyelenggaraan rapat/ persidangan yang diselenggarakan oleh DPRD;

- 5) Keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina keamanan serta ketertiban kedalam.

2. Bagian Umum dan Perlengkapan

Kepala Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintah dibidang Umum dan Perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan administrasi kepegawaian.
- 2) Melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Dewan, dan urusan rumah tangga pimpinan DPRD.
- 3) Melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan dan bahan peralatan.
- 4) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan barang/ infentaris.

3. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dalam merencanakan menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang Tata Usaha dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
- 2) Melaksanakan kearsipan
- 3) Menyusun administrasi kepegawaian
- 4) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
- 5) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian
- 6) Menyiapkan bahan administrasi pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dan formasi pegawai
- 7) Menganalisis laporan kinerja
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan atasan.

4. Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga

Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dalam merencanakan menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek Sekretariat DPRD
- 2) Mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD
- 3) Mengatur dan mengelolah keamanan komplek Sekretariat DPRD
- 4) Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan

- 5) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- 6) Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan
- 7) Merencanakan pemeliharaan alat – alat perlengkapan
- 8) Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- 9) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- 10) Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.
- 11) Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga
- 12) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan Sekretariat DPRD
- 13) Menganalisis laporan kinerja
- 14) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan atasan
- 15)

5. Bagian Hukum Dan Persidangan

Kepala Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Hukum dan Persidangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyelenggarakan kajian perundang-undangan
- 2) Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik

- 3) Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
- 4) Mengumpulkan bahan penyiapan draf Perda Inisiatif
- 5) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda
- 6) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan perda
- 7) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM)
- 8) Menyelenggarakan persidangan
- 9) Menyusun risalah
- 10) Merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat
- 11) Menyelenggrakan hubungan masyarakat
- 12) Menyelenggarakan publikasi
- 13) Menyelenggarakan keprotokolan
- 14) Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli

6. Sub Bagian Hukum

Kepala subbagian Hukum mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian Hukum dan Persidangan dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Hukum Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan kajian perundang-undangan
- 2) Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik
- 3) Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan
- 4) Membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda Inisiatif
- 5) Merancang bahan pembahasan Perda
- 6) Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM)
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan atasan.

7. Sub Bagian Persidangan

Kepala Subbagian Persidangan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian Hukum dan Persidangan dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Persidangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Persidangan Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang
- 2) Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat
- 3) Menyiapkan materi / bahan rapat DPRD
- 4) Memfasilitasi rapat-rapat DPRD
- 5) Merencanakan kegiatan DPRD
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD
- 7) Menganalisa data/bahan dukungan jaringan aspirasi masyarakat
- 8) Menyusun bahan komunikasi dan publikasi
- 9) Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD
- 10) Menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRD

- 11) Merencanakan kegiatan DPRD
- 12) Merencanakan keprotokolan pimpinan dprd
- 13) Menganalisis laporan kinerja
- 14) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan atasan.

8. Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun perencanaan anggaran
- 2) Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran
- 3) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan
- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
- 5) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran
- 6) Memverifikasi perencanaan kebutuhan anggaran
- 7) Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- 8) Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan
- 9) Pengevaluasian pengadaan barang dan jasa
- 10) Mengevaluasi laporan keuangan
- 11) Melaporkan kinerja
- 12) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- 13) Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan

4.2 Gambaran Umum Responden

Gambaran umum responden dilokasi penelitian dihasilkan data primer yang didapatkan dengan daftar pertanyaan dalam bentuk kusisioner yang telah dibagikan kepada para pegawai di dari 25 kusioner yang telah dibagikan kepada para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan hasilnya 25 kusioner juga kembali kepada peneliti. Tingkat pengembalian kusioner yang telah diedarkan kepada responden penelitian diperoleh sebanyak 100%. Hasil ini dikarenakan pada saat penyebaran kusioner penelitian para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semua berada ditempat dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD.

Berdasarkan data responden penelitian pada Tabel 4.1 Menyajikan beberapa informasi terkait obaservasi dilokasi penelitian. Informasi yang disajikan antara lain jenis kelamin laiki-laki lebih banyak dibanding responden perempuan, dimana responden laki-laki sebanyak 76% sedangkan responden perempuan 24%. Berdasarkan klasifikasi tingkat pendidikan mayoritas tingkat pendidikan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mempunyai pendidikan S1 sebanyak 72%, diikuti pendidikan S2 sebanyak 20%, dan sisanya berpendidikan SMA sebanyak 8%. Berdasarkan klasifikasi umur responden dilokasi penelitian sekitar 32% berumur 41-50 dan 50> tahun, kemudian diikuti 24 % berumur 31-40 tahun, sedangkan sisanya 12 % berumur <30 tahun.

Tabel 4.1 Data Demografi Responden

Keterangan	Jumlah (orang)	Persentase
Jenis Kelamin		
1. Laki-Laki	19	76%
2. Perempuan	6	24%
Pendidikan		

S2	5	20%
S1	18	72%
SMA	2	8%
Umur		
<30 tahun	3	12%
31-40 tahun	6	24%
41-50 tahun	8	32%
50>	8	32%

Sumber : Hasil olahan Penelitian

4.3 Hasil Penelitian

Pada dasarnya penelitian kuantitatif menggunakan alat kuesioner dalam bentuk pertanyaan dalam menunjang pelaksanaan penelitian dilokasi. Oleh sebab itu, perlu diuji validitas dan reliabilitas data yang digunakan untuk mengetahui pakan instrument kuesioner yang kita gunakan dan disebarluaskan kepada para responden dapat mengukur variabel yang akan diteliti. Uji validitas dan reliabilitas data ini dilakukan dengan cara menghitung masing-masing pertanyaan dan skor total yang dihasilkan dalam satu data. Berikut hasil uji validitas dan reliabilitas data penelitian yang dihasilkan .

4.3.1 Uji Validitas Data Responden Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ditabulasi terlebih dahulu lalu kemudian data tersebut diolah menggunakan *software* SPSS 21 untuk pengujian validitas dan reliabilitas data yang dihasilkan dilokasi penelitian. Hasil uji validitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan program *software* SPSS 21 hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koefesien korelasi *pearson moment* untuk setiap butir instrument pertanyaan dari responden yang tertuang dalam bentuk alat bantu kuesioner pertanyaan dengan variabel Akuntabilitas dan Transparansi (variabel X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (variabel Y) adalah signifikan, dimana hasil

signifikansinya sebesar 0,05 dengan demikian data tersebut dapat dinterpretasikan bahwa setiap variabel Akuntabilitas dan Transparansi (variabel X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (variabel Y) tersebut Valid. Oleh sebab itu, secara ringkas hasil uji validitas data intrumen Akuntabilitas dan Transparansi (variabel X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (variabel Y) dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas Instrument Akuntabilitas dan Transparansi (X)

No. Item	R_{xy}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,497	0.207	Valid
2	0,615	0.207	Valid
3	0,615	0.207	Valid
4	0,474	0.207	Valid
5	0,480	0.207	Valid
6	0,592	0.207	Valid
7	0,615	0.207	Valid
8	0,462	0.207	Valid
9	0,480	0.207	Valid
10	0,598	0.207	Valid
11	0,463	0.207	Valid

Sumber : Hasil olahan Penelitian

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Instrument Kinerja Anggota Dewan (Y)

No. Item	R_{xy}	r_{tabel}	Keterangan
1	0,571	0.207	Valid
2	0,708	0.207	Valid
3	0,814	0.207	Valid
4	0,739	0.207	Valid
5	0,788	0.207	Valid
6	0,678	0.207	Valid
7	0,788	0.207	Valid
8	0,700	0.207	Valid
9	0,477	0.207	Valid

Sumber : Hasil olahan Penelitian

Hasil analisis data yang didapatkan dari uji validitas instrument data penelitian pada Tabel 4.2 dan 4.3 menunjukkan bahwa semua item pertanyaan pada instrument pertanyaan pada kuesioner pada penelitian (1-11) dan (1-9) mengenai instrumen variabel Akuntabilitas dan Transparansi (variabel X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (variabel Y) dianggap Valid karena hasil item kuesioner menunjukkan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$. Hasil ini menunjukkan bahwa pengujian item kuesioner variabel Akuntabilitas dan Transparansi (variabel X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (variabel Y) dinyatakan valid dan dapat dilakukan untuk pengujian Reliabilitas yang dapat menunjukkan bahwa data tersebut konsisten dan dapat dipercaya serta menghasilkan data yang sama pula dalam penelitian ini.

4.3.2 Uji Reliabilitas Data Responden

Uji reliabilitas dalam hal ini mengacu pada nilai *Alpha* yang dihasilkan dalam output program SPSS 21 seperti halnya pada uji statistic lainnya. Hasil uji reliabilitas atau *Alpha Cronbach* berpedoman pada dasar pengambilan keputusan yang ditentukan.

Perhitungan nilai reliabilitas data penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik *split-half spearman brown* pada prinsipnya dilakukan menjadikan dua belahan butir-butir soal pervariabel lalu menghubungkan dua belahan tersebut dengan menggunakan rumus korelasi *spearman brown*. Jika hasil nilai korelasinya di atas $> 0,40$ maka nilai kerelasinya dinyatakan reliabel, kemudian angkanya tersebut disesuaikan dengan nilai r-tabel sehingga didapatkan angka reliabilitasnya. Hasil uji reliabilitas Akuntabilitas dan Transparansi (variabel X) terhadap Kinerja

Anggota Dewan (variabel Y) dari masing-masing variabel dapat dilihat dari Tabel 4.4 dan 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas Instrument Akuntabilitas dan Transparansi (X)

No. Item	R _{xy}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,558	0,207	Reliabel
2	0,453	0,207	Reliabel
3	0,453	0,207	Reliabel
4	0,495	0,207	Reliabel
5	0,512	0,207	Reliabel
6	0,460	0,207	Reliabel
7	0,453	0,207	Reliabel
8	0,507	0,207	Reliabel
9	0,512	0,207	Reliabel
10	0,554	0,207	Reliabel
11	0,647	0,207	Reliabel

Sumber : Hasil olahan Penelitian

Berdasarkan uji analisis reliabilitas dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 21 pada Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas (ri) dari instrument pertanyaan Akuntabilitas dan Transparansi (X) bedasarkan nilai *Alpha cronbach* $0,539 > 0,207$ (r-tabel) maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan yang sudah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa instrument pertanyaan Akuntabilitas dan Transparansi (X) dinyatakan Reliabel sebagai alat pengumpul data penelitian dan dapat dilanjutkan dengan uji instrument pertanyaan selanjutnya.

Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas Instrument Kinerja Anggota Dewan (Y)

No. Item	R _{xy}	r _{tabel}	Keterangan
1	0,853	0,207	Reliabel
2	0,828	0,207	Reliabel
3	0,814	0,207	Reliabel
4	0,824	0,207	Reliabel
5	0,817	0,207	Reliabel
6	0,831	0,207	Reliabel

7	0,818	0,207	Reliabel
8	0,829	0,207	Reliabel
9	0,869	0,207	Reliabel

Sumber : Hasil olahan Penelitian

Data uji analisis reliabilitas Instrument Kinerja Anggota Dewan (Y) dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 21 pada Tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa nilai reliabilitas (ri) dari instrument pertanyaan Kinerja Anggota Dewan (Y) bedasarkan nilai *Alpha cronbach* $0,844 > 0,207$ (r-tabel) maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan yang sudah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa instrument pertanyaan Kinerja Anggota Dewan (Y) dinyatakan Reliabel sebagai alat pengumpul data penelitian dan dapat dilanjutkan dengan uji instrument pertanyaan selanjutnya.

4.3.3 Hubungan Akuntrabilitas dan Transparansi (X) dan Kinerja Anggota Dewan (Y)

Berdasarkan analisis statistik untuk mengetahui hubungan Akuntabilitas dan Transparansi (variable X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (variabel Y) Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari hasil analisis statistik dengan menggunakan bantuanya *software* SPSS versi 21.

Hasil analisis uji koresi dihasilkan bahwa Akuntabilitas dan Transparansi (variable X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (variabel Y) ditujukan pada Tabel 4.6 sebagai berikut :

Tabel 4.6 Korelasi Akuntabilitas dan Transparansi (variable X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (variabel Y)

		Correlations		Akuntabilitas dan Transparansi	Kinerja Anggota Dewan
Akuntabilitas dan Transparansi	Pearson Correlation		1		,549**
	Sig. (2-tailed)				,017
	N		25		25
	Bias		0		,022
	Bootstrap ^c	Std. Error	0		,202
	95% Confidence	Lower	1		,214
	Interval	Upper	1		,357
	Pearson Correlation		,549**		1
	Sig. (2-tailed)		,017		
Kinerja Anggota	N		25		25
	Bias		,022		0
	Bootstrap ^c	Std. Error	,202		0
	95% Confidence	Lower	,214		1
	Interval	Upper	,357		1

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

Berdasarkan hasil uji korelasi ditemukan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara variabel bahwa Akuntabilitas dan Transparansi (variabel X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (variabel Y) dengan nilai $r=0,549$; $P<0,001$ karena r hitung atau *pearson correlation* dalam uji statistik bernilai positif artinya bahwa semakin tinggi nilai Akuntabilitas dan Transparansi (variabel X) maka akan semakin tinggi pula nilai Kinerja Anggota Dewan (variabel Y) Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

4.3.4 Uji Hipotesis Menggunakan Regresi Sederhana

4.3.4.1 Akuntabilitas dan Transparansi Berpengaruh Secara Simultan Terhadap Kinerja Anggota Dewan

Berdasarkan uji analisis regresi sederhana antara variabel Akuntabilitas dan Transparansi (variabel X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (variabel Y) Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditujuan pada Tabel 4.7 sebagai berikut :

Model Summary

Mode 1	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,549 ^a	,622	,520	3,376

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas dan Transparansi

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,949	1	5,949	,522
	Residual	262,211	23	11,400	
	Total	268,160	24		

a. Dependent Variable: Kinerja Anggota Dewan

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas dan Transparansi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31,929	11,967		,014
	Akuntabilitas dan Transparansi	,474	,541	,549	,722

a. Dependent Variable: Kinerja Anggota Dewan

Hasil uji analisis regresi liner ditemukan bahwa nilai signifikansi variabel Akuntabilitas dan Transparasi (X) $0,000 < 0,005$ maka disimpulkan bahwa

Akuntabilitas dan Transparansi (X) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Anggota Dewan (Y) (H1 diterima). Hasil nilai Tabel *Model Summary* dari hasil analisis menggunakan SPSS 21 diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,622 maka memiliki arti bahwa sumbangan variabel Akuntabilitas dan Transparasi (X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (Y) sebesar 62,2% sedangkan sisanya 37,8% dipengaruhi oleh faktor-fator lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antar variabel Akuntabilitas dan Transparansi (X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (Y) dengan nilai $r=0,549$; $P<0,001$ karena nilai r -hitung atau *pearson correlation* dalam uji statistik bernilai positif artinya bahwa semakin tinggi nilai variabel Akuntabilitas dan Transparansi (X) maka akan semakin tinggi pula nilai Kinerja Anggota Dewan (Y) Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil nilai Tabel *Model Summary* dari hasil analisis menggunakan SPSS 21 diketahui bahwa nilai *R Square* sebesar 0,622 maka memiliki arti bahwa sumbangan variabel Akuntabilitas dan Transparansi (X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (Y) sebesar 62,2% sedangkan sisanya 37,8% dipengaruhi oleh faktor-fator lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil ini tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara Akuntabilitas dan Transparansi (X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (Y) ini memberi arti bahwa Akuntabilitas dan Transparansi sangat menuntukkan bagi Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Akuntabilitas dan Partisipasi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bollang Mongodow Utara. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Anggota DPRD dipengaruhi oleh variabel Akuntabilitas dan Transparansi kebijakan publik sebesar 62,2%. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Josef (2010) partisipasi aktif anggota masyarakat menentukan keberhasilan penyelenggaran otonomi daerah. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah daerah dapat terwujud dalam beberapa cara, diantaranya memberikan masukan berupa aspirasi dan direalisasikan dengan adanya forum komunikasi antar dewan dan masyarakat yang diselenggarakan. Akuntabilitas dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.Utami dan Syofyan (2013) mengemukakan bahwa Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses informasi atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Jadi Akuntabilitas dan Transparansi harus mengandung keterbukaan. Pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Kemajuan informasi dan teknologi telah mendorong berbagai pihak untuk mengakses, mengelola dan menggunakan informasi untuk lebih mendorong pemerintahan yang transparan. Akuntabilitas sangat berperan penting dalam pelaksanaan pertanggungjawaban

karena adanya akuntabilitas akan semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas kerja anggota DPRD. Partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaan kerja anggota DPRD karena dengan adanya aspirasi masyarakat akan semakin termotivasi dalam meningkatkan kualitas kerja anggota DPRD. Transparansi kebijakan publik merupakan prinsip *good governance*, sehingga semakin transparan pelaporan aktifitas dan tanggung jawab anggota DPRD maka semakin meningkatkan efektifitas kerja anggota DPRD

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dikemukkan, maka dapat di tarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

Akuntabilitas dan Transparansi (X) terhadap Kinerja Anggota Dewan (Y) sebesar 62,2% sedangkan sisanya 37,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti pada penelitian ini. Hasil penelitian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi Akuntabilitas dan Transparansi maka akan semakin meningkat pula Kinerja Anggota Dewan Kabupaten Bolaang Mongodow Utara. Anggota dewan stimulus yang diterima berdasarkan objek yang dipersepsikan yaitu akuntabilitas dan transparansi. Oleh karena itu, semakin baik pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi, semakin baik pula kinerja anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara..

5.1 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dihasilkan tersebut, ditarik kesimpulan bahwa Anggota Dewan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow tetap meningkatkan prinsip-prinsip good governance secara optimal dalam melaksanakan Angkutabitas dan Transparansi terhadap Kinerja Aggota Dewan .

DAFTAR PUSTAKA

Amin, F. (2019). *Penganggaran di pemerintah daerah*. Universitas Brawijaya Press.

Nurdiansyah, E. (2016). Keterbukaan informasi publik sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3(2), 147-151.

Ardinasari, I. F., & Aisyah, M. N. (2017). Kapasitas Individu, Budaya Organisasi, dan Asimetri Informasi pada Penyusunan Anggaran Partisipatif terhadap Budgetary Slack. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(5)

Tuasikal, A. (2015). Fenomenologis perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 11(2), 78-91.

Siwu, H. F. D. (2019). Strategi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(6).

Huda, N. M. (2019). *Hukum pemerintahan daerah*. Nusa Media.

Prayoga, R., Lubis, Z. T., & Dalimunthe, A. A. (2022). Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Mewujudkan Fungsi Pengawasan Anggaran. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(3), 380-388.

Mashadi, M. (2018). *Akuntabilitas Ideal Bungan Rampai Gagasan Seorang Akuntan Holistik*. Deepublish.

Indahsari, C. L., & Raharja, S. U. J. (2020). New public management (NPM) as an effort in governance. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(2), 73-81.

Puspawati, A. A. (2016). Penerapan New Public Management (NPM) Di Indonesia (Reformasi Birokrasi, Desentralisasi, Kerjasama Pemerintah dan Swasta Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik). *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 1(1), 38-53.

Indrawati, L. (2017). Peran Budaya Organisasi Terhadap Implementasi New Public Management Dalam Peningkatan Kinerja Manajerial Sektor Publik. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi*, 9(2), 239-249.

Svara, J. H. (2017). Reinventing and redesigning local government. In *Leadership and Change in Public Sector Organizations* (pp. 17-39). Routledge.

Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas organisasi sektor publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17-26.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta

Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Husain, F. (2021). *Kinerja pengawasan DPRD: pengetahuan anggaran, budaya kerja dan transparansi publik*. CV. cahaya Arsh Publisher & Printing.

Yusfizal, A., & Zuhri, M. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Dana Aspirasi Oleh Anggota Legislatif. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 2(1), 36-44.

**TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

I. Identitas Responden

Nama Responden :

Usia :

Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan. (coret
yang tidak perlu)

Pendidikan Terakhir :

Masa Kerja :

Jabatan :

Usia :

< 30 tahun 30-40 tahun 41-50 tahun >50 tahun

II. Petunjuk Pengisian

1. Berilah tanda checklist (✓) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat anda alami sebagai tenaga kerja pada komponen- komponen variabel. Masing-masing pilihan jawaban memiliki makna sebagaimana berikut:

SS = Apabila jawaban tersebut menurut anda sangat setuju.

S = Apabila jawaban tersebut menurut anda setuju.

TS = Apabila jawaban tersebut menurut anda tidak setuju.

STS = Apabila jawaban tersebut menurut anda sangat tidak setuju.

2. Diharapkan untuk tidak menjawab lebih dari satu pilihan jawaban.

3. Atas partisipasi anda, saya ucapkan terima kasih.

Lampiran 1

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Akuntabilitas Dan Transparansi (X)						
	A. Transparansi Informasi					
1.	Sepengetahuan anda, publik merasa mudah mengakses dokumen publik tentang keuangan daerah					

2.	Sepengetahuan anda, sulit bagi publik untuk mengakses dokumen pemerintah daerah tentang keuangan daerah dengan sistem birokrasi saat ini				
3.	Sepengetahuan anda, publik bisa mengakses dokumen publik tentang keuangan daerah sewaktu-waktu				
	B. Partisipasi Public				
4.	Pelaksanaan program-program dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.				
5.	Selalu melibatkan masyarakat dalam perencanaan penyusunan arah dan kebijakan				
6.	Selalu menerima kritik dan saran masyarakat dalam perencanaan anggaran				
	C. Kepatuhan Terhadap Regulasi				
7	Pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien untuk mencapai tujuan pemerintah				
8	Pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif agar semua program tercapai sesuai target				
	D. Kualitas Perencanaan Anggaran				
10	Perencanaan anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya				
11.	Revisi anggaran dilakukan akibat kesalahan penentuan mata anggaran dan perencanaan anggaran yang kurang matang				

No	Pertanyaan	SS	S	KS	TS	STS
Kinerja Anggota Dewan (Y)						
	A. Pemahaman Anggaran					
1	Anggota DPRD mengetahui tata cara penyusunan anggaran.					
2	Dewan selalu mengevaluasi laporan bulanan yang dibuat oleh eksekutif guna mendeteksi adanya kegagalan atau kebocoran anggaran.					
3	Pelaksanaan anggaran sudah sesuai dengan program yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.					
	B. Analisis Kebijakan Anggaran					
4	Program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisien bahwa penggunaan dana masyarakat menghasilkan output maksimal (berguna).					
5	Pelaksanaan program-program anggaran (APBD) benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (publik).					
6	Anggaran yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik.					
	C. Pengawasan Eksekusi Anggaran					
7	Sebagai wakil rakyat di anggota dewan, Bapak/ Ibu merasa bertanggung jawab dalam pengawasan anggaran.					
8	Sebagai anggota dewan, Bapak/ Ibu merasa bertanggung jawab dalam pengawasan anggaran pada saat pelaksanaan APBD hanya dilakukan pihak pemerintah.					
9	Sebagai anggota dewan, Bapak/ Ibu merasa bertanggung jawab dalam pengawasan anggaran pada saat pertanggungjawaban APBD hanya dilakukan oleh pihak pemerintah					

TABULASI DATA VARIABEL AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI (X)

TABULASI DATA VARIABEL KINERJA ANGGOTA DEWAN (Y)

RESPONDEŃ	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Total
1	4	5	5	5	4	5	5	4	5	42
2	5	4	5	5	4	5	5	4	5	42
3	5	4	5	5	4	5	5	4	5	42
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
5	4	4	4	4	3	5	4	3	4	35
6	5	5	4	4	4	5	5	4	5	41
7	5	4	4	4	5	5	5	4	4	40
8	4	4	4	4	4	5	4	4	4	37
9	5	3	5	3	4	4	5	5	5	39
10	4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
11	3	5	4	4	4	5	5	4	5	39
12	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
16	5	5	4	5	4	5	4	5	4	41
17	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
18	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
19	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
20	5	4	4	5	4	4	4	5	3	38
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
22	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
24	4	4	4	4	4	4	4	4	5	37
25	4	5	4	5	5	5	4	4	5	41

DATA FREKUENSI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI (X)

Correlations

	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6	Item_7	Item_8	Item_9
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	Pearson Correlation	1	,039	,180	,090	,004	-,063	,180	,161	-
Item_1	Sig. (2-tailed)		,852	,390	,669	,984	,765	,390	,442	-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	Pearson Correlation	,039	1	,272	,472*	,124	,698**	,272	-,083	-
Item_2	Sig. (2-tailed)	,852		,189	,017	,555	,000	,189	,694	-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	Pearson Correlation	,180	,272	1	,323	-,158	,245	1,000**	,353	-
Item_3	Sig. (2-tailed)	,390	,189		,116	,451	,238	,000	,084	-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	Pearson Correlation	,090	,472*	,323	1	,102	,201	,323	,289	-
Item_4	Sig. (2-tailed)	,669	,017	,116		,629	,335	,116	,161	-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	Pearson Correlation	,004	,124	-,158	,102	1	-,011	-,158	,111	,8
Item_5	Sig. (2-tailed)	,984	,555	,451	,629		,960	,451	,597	-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	Pearson Correlation	-,063	,698**	,245	,201	-,011	1	,245	,220	-
Item_6	Sig. (2-tailed)	,765	,000	,238	,335	,960		,238	,291	-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	Pearson Correlation	,180	,272	1,000**	,323	-,158	,245	1	,353	-
Item_7	Sig. (2-tailed)	,390	,189	,000	,116	,451	,238		,084	-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	Pearson Correlation	,161	-,083	,353	,289	,111	,220	,353	1	-
Item_8	Sig. (2-tailed)	,442	,694	,084	,161	,597	,291	,084		-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	Pearson Correlation	-,104	,218	-,064	,217	,855**	-,011	-,064	-,057	-
Item_9	Sig. (2-tailed)	,620	,295	,762	,297	,000	,960	,762	,786	-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	Pearson Correlation	-,428*	,173	-,275	-,103	,448*	,201	-,275	,021	-
Item_10	Sig. (2-tailed)	,033	,408	,184	,624	,025	,335	,184	,919	-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	Pearson Correlation	-,010	-,172	,143	-,485*	-,367	,121	,143	-,154	-
Item_11	Sig. (2-tailed)	,963	,411	,497	,014	,071	,563	,497	,462	-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-
	Pearson Correlation	,197	,615**	,615**	,474*	,480*	,592**	,615**	,462*	-
Total_Skor	Sig. (2-tailed)	,346	,001	,001	,017	,015	,002	,001	,020	-
	N	25	25	25	25	25	25	25	25	-

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI (X)

No. Item	R _{xy}	R _{tabel}	Keterangan
1	0,497	0,207	Valid
2	0,615	0,207	Valid
3	0,615	0,207	Valid
4	0,474	0,207	Valid
5	0,480	0,207	Valid
6	0,592	0,207	Valid
7	0,615	0,207	Valid
8	0,462	0,207	Valid
9	0,480	0,207	Valid
10	0,598	0,207	Valid
11	0,463	0,207	Valid

DATA RELIABITAS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI (X)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	25	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	25	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,539	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item_1	45,12	7,860	,020	,558
Item_2	45,04	6,457	,461	,453
Item_3	45,04	6,457	,461	,453
Item_4	44,88	7,110	,330	,495
Item_5	45,20	6,667	,239	,512
Item_6	44,88	6,443	,420	,460
Item_7	45,04	6,457	,461	,453
Item_8	45,04	6,873	,255	,507
Item_9	45,20	6,667	,239	,512
Item_10	44,88	7,860	,032	,554
Item_11	45,28	8,877	-,288	,647

DATA FREKUENSI KINERJA ANGGOTA DEWAN (Y)

Correlations

	Item_1	Item_2	Item_3	Item_4	Item_5	Item_6
Item_1 Pearson Correlation	1	,029	,452*	,335	,335	,211

	Sig. (2-tailed)		,890	,023	,102	,101	,311
	N	25	25	25	25	25	25
	Pearson Correlation	,029	1	,312	,699**	,585**	,677**
Item_2	Sig. (2-tailed)	,890		,128	,000	,002	,000
	N	25	25	25	25	25	25
	Pearson Correlation	,452*	,312	1	,524**	,529**	,421*
Item_3	Sig. (2-tailed)	,023	,128		,007	,007	,036
	N	25	25	25	25	25	25
	Pearson Correlation	,335	,699**	,524**	1	,540**	,565**
Item_4	Sig. (2-tailed)	,102	,000	,007		,005	,003
	N	25	25	25	25	25	25
	Pearson Correlation	,335	,585**	,529**	,540**	1	,403*
Item_5	Sig. (2-tailed)	,101	,002	,007	,005		,046
	N	25	25	25	25	25	25
	Pearson Correlation	,211	,677**	,421*	,565**	,403*	1
Item_6	Sig. (2-tailed)	,311	,000	,036	,003	,046	
	N	25	25	25	25	25	25
	Pearson Correlation	,398*	,398*	,784**	,313	,528**	,582**
Item_7	Sig. (2-tailed)	,049	,049	,000	,128	,007	,002
	N	25	25	25	25	25	25
	Pearson Correlation	,517**	,394	,594**	,468*	,685**	,126
Item_8	Sig. (2-tailed)	,008	,051	,002	,018	,000	,548
	N	25	25	25	25	25	25
	Pearson Correlation	-,150	,214	,385	,029	,165	,254
Item_9	Sig. (2-tailed)	,473	,305	,057	,890	,430	,220
	N	25	25	25	25	25	25
	Pearson Correlation	,517**	,708**	,814**	,739**	,788**	,678**
Total_Sk or	Sig. (2-tailed)	,008	,000	,000	,000	,000	,000
	N	25	25	25	25	25	25

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

UJI VALIDITAS KINERJA ANGGOTA DEWAN (Y)

No. Item	R _{xy}	R _{tabel}	Keterangan
1	0,571	0,207	Valid
2	0,708	0,207	Valid
3	0,814	0,207	Valid
4	0,739	0,207	Valid

5	0,788	0.207	Valid
6	0,678	0.207	Valid
7	0,788	0.207	Valid
8	0,700	0.207	Valid
9	0,477	0.207	Valid

DATA RELIABITAS KINERJA ANGGOTA DEWAN (Y)

Case Processing Summary		
	N	%
Valid	25	100,0
Cases Excluded ^a	0	,0
Total	25	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,848	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Item_1	36,08	9,493	,370	,853
Item_2	36,08	8,743	,602	,828
Item_3	36,08	8,660	,751	,814
Item_4	36,04	8,623	,641	,824
Item_5	36,20	8,500	,709	,817
Item_6	35,84	9,307	,593	,831
Item_7	35,96	8,790	,720	,818
Item_8	36,16	8,807	,593	,829
Item_9	36,04	10,040	,213	,869

KORELASI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI (X) TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN (Y)

Correlations

		Akuntabilitas dan Transparansi	Kinerja Anggota
Akuntabilitas dan Transparansi	Pearson Correlation	1	,549**
	Sig. (2-tailed)		,017
	N	25	25
	Bias	0	,022
	Bootstrap ^c	Std. Error	0
		95% Confidence Interval	Lower
			1
		95% Confidence Interval	Upper
	Pearson Correlation		,214
Kinerja Anggota	Sig. (2-tailed)		,357
	N	25	25
	Bias	,022	0
	Bootstrap ^c	Std. Error	,202
		95% Confidence Interval	Lower
			,214
		95% Confidence Interval	Upper
	Pearson Correlation		1
	Sig. (2-tailed)		,017

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples

ANALISIS REGRESI SEDERHANA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,549 ^a	,622	,520	3,376

a. Predictors: (Constant), Akuntabilitas dan Transparansi

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5,949	1	5,949	,522
	Residual	262,211	23	11,400	
	Total	268,160	24		

a. Dependent Variable: Kinerja Anggota

b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas dan Transparansi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	31,929	11,967		2,668 ,014
	Akuntabilitas dan Transparansi	,474	,541	,549	,722 ,477

a. Dependent Variable: Kinerja Anggota

Bootstrap for Coefficients

Model	B	Bootstrap ^a				
		Bias	Std. Error	Sig. (2-tailed)	95% Confidence Interval	
					Lower	Upper
1	(Constant)	31,929	,326	12,519	,021	5,204 53,584
	Akuntabilitas dan Transparansi	,474	,003	,250	,507	,364 ,711

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4982/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Badan KESBANGPOL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Husen Yahya Suit Pontoh

NIM : S2120041

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Lokasi Penelitian : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Judul Penelitian : PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Desa Boroko Kec. Kaldipang Kode Pos 95765

REKOMENDASI
Nomor : 220/15/KBP/BMU/II/2024

Berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4982/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2024 Tanggal 11 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama	:	Husen Yahya Suit Pontoh
NIM	:	S2120041
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Alamat	:	Desa Bolangitang 1 Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi guna menempuh Ujian Akhir pada Fakultas Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimulai dari 23 Januari s/d 23 maret 2024 dengan Judul :

“PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA”

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut harus melaporkan terlebih dahulu kepada pimpinan tempat pelaksanaan penelitian dengan menunjukkan surat rekomendasi ini;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan dan hasilnya dilaporkan kepada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
3. Memperhatikan stabilitas keamanan dilokasi dan sekitar kegiatan;
4. Apabila masa berlaku rekomendasi ini sudah berakhir sedangkan pelaksanaan belum selesai dapat mengajukan kembali untuk diperpanjang;
5. Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang rekomendasi ini tidak memenuhi / mengindahkan ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini diberikan guna keperluan.

Boroko 23 Januari 2024
a.n. Kepala Kantor
Kasubag TU

HASAN IYABI, S.I.P
NIP. 19830714 201502 1 001

Tembusan :

1. Yth, Pj. Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sebagai Laporan);
2. Yth, Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Utara;
3. Yth, Sekretaris DPRD Kab. Bolaang Mongondow Utara;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**

Kampus Unisan Gorontalo Lt. 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
, Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4982/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran :-

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisvari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Husen Yahya Suit Pontoh
NIM : S2120041
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Lokasi Penelitian : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
Judul Penelitian : PENGARUH AKUNTABILITAS TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Alamat : Jln. Trans Sulawesi Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kode Pos 95765

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor: 170/ /Skrt-DPRD/BMU/III /2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Frangky Chendra
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Husen Yahya Soeit Pontoh
NIM : S2120041
Institusi : Universitas Ichsan Gorontalo
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Mahasiswa yang bersangkutan tersebut di atas telah selesai melakukan Penelitian, Terhitung Mulai Tanggal 23 Januari sampai dengan 23 Maret 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan Judul Penelitian **" Pengaruh Akuntabilitas dan Trasparansi Anggaran Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara"**

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/0/2001
Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435)829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
Nomor : 063/FISIP-UNISAN/S-BP/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purwanto, S.I.P.,M.Si
NIDN : 0926096601
Jabatan : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : HUSEN YAHYA SUIT PONTOH
NIM : S2120041
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 15 % berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujangkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Dekan,

Dr. Mochammad Sakir, S.Sos.,S.I.Pem.,M.Si
NIDN. 0913027101

Gorontalo, 15 Juni 2024
Tim Verifikasi,

Purwanto, S.I.P.,M.Si
NIDN. 0926096601

Terlampir:
Hasil Pengecekan Turnitin
DF

PAPER NAME

SKRIPSI HUSEN YAHYA PONTOH.doc

AUTHOR

HUSEN YAHYA SUIT PONTOH

WORD COUNT

10987 Words

CHARACTER COUNT

75080 Characters

PAGE COUNT

70 Pages

FILE SIZE

1.1MB

SUBMISSION DATE

Jun 10, 2024 3:16 PM GMT+8

REPORT DATE

Jun 10, 2024 3:17 PM GMT+8

● 15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

● 15% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 15% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 3% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	simdos.unud.ac.id	2%
	Internet	
2	files.osf.io	1%
	Internet	
3	adesuherman.blogspot.com	1%
	Internet	
4	repository.unhas.ac.id	<1%
	Internet	
5	journal.stieamkop.ac.id	<1%
	Internet	
6	e.diklatgarbarata.id	<1%
	Internet	
7	core.ac.uk	<1%
	Internet	
8	id.wikipedia.org	<1%
	Internet	

9	jdihhukum.labuhanbatukab.go.id	<1%
	Internet	
10	text-id.123dok.com	<1%
	Internet	
11	jdih.magelangkab.go.id	<1%
	Internet	
12	download.garuda.kemdikbud.go.id	<1%
	Internet	
13	scribd.com	<1%
	Internet	
14	repository.upi.edu	<1%
	Internet	
15	repository.uinjambi.ac.id	<1%
	Internet	
16	jurnal.unigo.ac.id	<1%
	Internet	
17	123dok.com	<1%
	Internet	
18	ejurnal.unisan.ac.id	<1%
	Internet	
19	onlinehulp-arteveldehogeschool.be	<1%
	Internet	
20	eprints.ung.ac.id	<1%
	Internet	

21 repository.radenintan.ac.id <1%
Internet

22 slideshare.net <1%
Internet

23 thesis.binus.ac.id <1%
Internet

BIODATA



I. Identitas

Nama : Husen Yahya Suit Pontoh
Nim : S2120041
Tempat, Tanggal Lahir : Bolangitang, 20 Juli 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Anggaran Terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Alamat : Bolangitang 1, Kecamatan Bolangtang Barat, Kab. Bolaang Mongondow Utara
Alamat e-mail : husenyahyasuitpontoh@gmail.com
No. HP : 0812-4142-4301

II. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Inpres Bolangtang
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SLTP Negeri 1 Bolangitang

Paket C Palu 17 Juli 200